

Cornelis Kesal Dinilai WDP

■ BPK Minta Selesaikan Aset

PONTIANAK, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2011. Penilaian ini diberikan lantaran Pemprov tak mampu mendata dan mengelola aset yang ada. Penilaian yang sama juga diberikan pada 2010 lalu.

Gubernur Kalbar Cornelis merasa tidak puas atas penilaian tersebut. Ia menyatakan, Kalbar bisa meraih penilaian lebih baik jika pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajarannya bisa bekerja mak-



TRIBUN/DOK

” Pak Gubernur itu seorang pemimpin, tidak mungkin kesal. Beliau tahu ini proses yang panjang dan memakan waktu. ”

M ZEET HAMDY ASSOVIE

Sekda Kalbar

simal.

”Kesalahannya tidak terlalu prinsip. Hanya mencatat, membukukan harta kekayaan tidak dilakukan. Saya sebenarnya sangat kesal, padahal itu tidak terlalu sulit,” ujar Cornelis kepada wartawan usai mengikuti paripurna di DPRD Kalbar,

■ Bersambung ke Hal 15

Tribun Pontianak

JUMAT

6 JULI 2012

Cornelis Kesal Dinilai WDP

Kamis (5/7).

Ia menyatakan akan mengambil langkah terhadap hasil penilaian ini. ”Habis ini diarahkan dan dikumpulkan di Pendopo,” tuturnya.

Menurutnya, rekomendasi dari BPK ini harus dilaksanakan seluruh jajarannya. Ia bahkan akan melakukan penyegaran terhadap pejabat daerah yang tak mampu melaksanakan tugas dengan baik. ”Kalau ini tidak selesai-selesai, ya mau tidak mau. Inikan ada batas waktu,” katanya.

Anggota VI BPK RI Rizal Djalil memastikan jika opini WDP diberikan karena Pemprov masih terkendala permasalahan aset.

”Sayang seribu kali sayang persoalan kecil ini mengganggu sekali. Saya tidak bisa memaksakan teman-teman di BPK Kalbar untuk menyatakan opini yang seperti yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan tentu diinginkan Pak Gubernur dan semua yang ada di sini yaitu WTP. Saya berjanji, kalau persoalan aset selesai dan tidak ada signifikan, Pemprov Kalbar dapat WTP,” kata Rizal.

Menurutnya, penilaian laporan keuangan oleh BPK RI secara global memperlihatkan banyak kemajuan yang dicapai, seperti peningkatan surplus dari Rp 78,7 miliar naik menjadi Rp 206,9 miliar. Begitu pula dengan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2010 naik Rp 111 miliar menjadi Rp 342 miliar pada 2011 yang dari semula

hanya Rp 231 miliar.

”Untuk Silpa itu jika ingin digunakan haruslah dibicarakan bersama-sama dengan anggota dewan, pimpinan dewan untuk menghindari terjadinya kesalahan,” jelas Rizal.

Kemudian, jelasnya, hal yang perlu dicatat dalam LHP Kalbar 2011, yakni tingkat investasi Pemprov Kalbar yang naik sebesar Rp 0,43 triliun pada 2010 menjadi Rp 2,9 triliun pada 2011.

Meski sudah terjadi perubahan yang signifikan, lanjut Rizal, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya sudah pernah disampaikan pada saat penyampaian LHP beberapa waktu lalu. Persoalan aset masih menjadi kendala utama dan paling menonjol adalah aset tetap dan berjalan dan jaringan irigasi senilai Rp 380 miliar yang masih belum ditata kelola dalam bentuk pembukuan yang benar.

”Di Kalbar ini irigasi dan jalan ada tetapi tidak sesuai spek dan belum dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang benar dan aset juga harus diperbaiki,” tegasnya.

Hal lain yang berkaitan dengan aset, yakni aset sangat bernilai Rp 92,2 miliar yang masih belum tuntas juga permasalahannya. Kemudian, alat dan mesin sebesar Rp 2,8 miliar, di samping itu juga ada aset tanah yang belum dibukukan seluas 87.302.153,26 meter senilai Rp 53 miliar lebih.

”Saya meminta secara khusus kepada Sekda Kalbar dan semua jajaran SKPD yang ter-

kait dalam penyelesaian aset ini terutama Dinas Pekerjaan Umum, BPN dan semuanya untuk segera membuat aksi plan memperbaiki, menatalaksanakannya, membukukannya, menilai dan seterusnya sehingga persoalan aset dapat selesai,” ungkap Rizal.

Menurut Rizal, permasalahan teknis seperti itu bukan tugasnya gubernur Kalbar, melainkan tugas SKPD.

”Saya berharap sekali lagi kepada Sekda Kalbar untuk dapat mengorganisasi, mendorong dan memotivasi teman-teman SKPD untuk menyelesaikan masalah aset itu. Sekali lagi, masalahnya bukan aset tidak ada tetapi tidak dibukukan dengan standar akuntansi yang ada,” tegas Rizal.

Tidak itu saja, Rizal mengungkapkan, kesalahan penganggaran pun menjadi kendala dalam pengelolaan aset Kalbar.

”Tetapi, saat ini bukanlah waktunya untuk menyatakan siapa yang bersalah yang penting bagaimana memperbaikinya,” jelasnya.

Ke depan diharapkan, SKPD terkait dapat menghubungi panitia anggaran dan memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang kembali.

Menurutnya pula, permasalahan aset itu pun tidak perlu diselesaikan dengan membentuk panitia khusus karena hanya salah pada nomenklatur saja.

Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie menyarankan per-

masalah aset sudah terjadi sejak lama. ”Ini kerjaan dari zaman batu, dari zaman Majapahit,” ujar Sekda kepada wartawan.

Mengenai pernyataan Gubernur yang akan melakukan penyegaran bagi pimpinan di jajarannya yang tak mampu bekerja maksimal, M Zeet menanggapi ringan. ”Itu memang hak asasi beliaukan,” katanya.

Meski demikian ia mengaku siap melaksanakan rekomendasi BPK RI. ”Tadi kata Pak Rizal tidak perlu pangs supaya lebih cepat kerjanya. Kalau kita bisa langsung bertemu bersama, duduk bersama, kemudian kita petakan peta, selesaikan secara teknis dan administratif dan politik, maka barang ini selesai,” katanya.

Menurutnya, ada tiga kategori aset yang harus diselesaikan yakni secara teknis, administratif dan politis. Secara administrasi merupakan tugas Sekda. ”Kalau secara teknis SKPD-SKPD, secara politis adalah kepentingan dua lembaga,” paparnya.

Diminta tanggapan tentang kekesalan Gubernur atas penilaian WDP yang didapat, Sekda meyakini Gubernur memahaminya.

”Ya enggak lah. Pak Gubernur itu seorang pemimpin, tidak mungkin kesal. Beliau tahu ini proses yang panjang dan memakan waktu. Kita perlu menyelesaikan secara bertahap. Kita ingin WTP dengan fundamen yang kuat, kokoh,” ungkapnya. (rhd/ant)

Sambungan Hal. 9